

Implementasi Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) dalam Pengembangan Kawasan Agribisnis Jeruk; Kendala dan Upaya Perbaikannya

Rita Indrasti

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jl. Tentara
Pelajar No. 10, Cimanggu. Bogor.
Email : ritaindrasti@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) merupakan satu pendekatan dalam pengembangan kawasan jeruk secara nasional. Dalam pengembangan kawasan agribisnis jeruk, penerapan PTKJS menjadi komponen manajemen yang penting salah satunya adalah penggunaan benih berlabel. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi PTKJS adalah tidak selamanya benih berlabel tersedia, pengendalian H/P secara hayati masih terbatas, sikap petani yang masih individual dan sistem pemasaran. Upaya perbaikan dalam PTKJS adalah peran BBI (Balai Benih Induk) yang harus ditingkatkan, pemanfaatan hasil-hasil pengkajian, peningkatan peran penyuluhan dan mengembangkan kelembagaan pemasaran. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2015. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dalam mengimplementasikan PTKJS dan menyarankan upaya perbaikannya. Metode penulisannya adalah review maka penulisan ini disusun berdasarkan data sekunder dari wilayah pengkajian Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Data tersebut terkait dengan komponen-komponen teknologi PTKJS yang diimplementasikan di beberapa daerah sentra jeruk.

Kata kunci: PTKJS, bibit berlabel dan implementasi.

PENDAHULUAN

Jeruk sudah tumbuh di Indonesia sejak ratusan tahun lalu, baik secara alami maupun dibudidayakan. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia merupakan peninggalan Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Italia. Jeruk memiliki banyak spesies dari enam genus (Azis, 1993).

Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) merupakan model pendekatan pengelolaan kebun jeruk secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai komponen teknologi pengelolaan jeruk. Penerapan PTKJS bertujuan menghasilkan buah jeruk yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pasar domestik maupun ekspor (Ruswandi, 2007). Pola pendekatan tersebut terdiri atas lima komponen teknologi, yaitu : (1) Penanaman benih bebas penyakit atau berlabel, (2) Pengendalian serangga vector penular penyakit CVPD, yakni psylid *Diaphorina citri*, dan hama penting lainnya, (3) Sanitasi kebun, (4) Pemeliharaan optimal kebun jeruk, dan (5) Konsolidasi pengelolaan kebun-kebun jeruk (Supriyanto, 1992a). Model tersebut telah diimplementasikan di sejumlah daerah pengembangan jeruk, seperti Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Metode penulisannya adalah review maka penulisan ini disusun berdasarkan data sekunder dari beberapa wilayah pengkajian.

Kendala utama dalam pembudidayaannya sampai saat ini adalah penyakit huanglongbin atau dikenal sebagai CVPD yang dapat menyebabkan kerugian besar di berbagai sentra produksi (Muharam and Whittle, 1992). Penerapan teknologi pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat (PTKJS) yang dihasilkan oleh Balitbangtan telah dilaksanakan oleh sebagian besar petani pengelola tanaman jeruk yang sudah mendapat informasi teknologi (Hardiyanto, 2011). Kelompok Tani sebagai satuan terkecil memiliki anggota dengan berbagai kemampuan adopsi yang berbeda, untuk itu harus dilakukan transfer teknologi yang lebih intensif dari petani yang telah melaksanakan teknologi PTKJS kepada

yang belum melaksanakan. Disisi lain disadari bahwa masih banyak kelompok tani yang belum menerapkan teknologi PTKJS secara benar dan konsisten (Balitjestro, 2014).

Pembudidayaan jeruk di Indonesia banyak menghadapi masalah, terutama terbatasnya benih yang sehat dan bebas penyakit serta adanya serangan penyakit CVPD. Pengelolaan jeruk di lapang harus didekati secara terpadu, yaitu menerapkan berbagai teknologi yang harmonis di lapang. Dengan demikian, hasil buah jeruk yang bermutu tinggi sesuai kebutuhan pasar akan lebih mudah untuk diperoleh (Supriyanto, 1992b).

Pengembangan kawasan agribisnis jeruk akan sangat tergantung dari keberhasilan menerapkan PTKJS di lapangan. Kelembagaan pemasaran lebih lanjut akan berperan penting pada fase hilir, yaitu pemasaran buah jeruk di pasar domestik atau ekspor (Puslitbang hortikultura 2010).

Kendala yang dihadapi pada penerapan PTKJS adalah, bibit berlabel tidak selamanya tersedia, pengendalian H/P secara hayati masih sangat terbatas karena petani masih banyak menggunakan pestisida sintesis/kimia, sikap petani yang masih individual tidak mau berkelompok, sistem pemasaran masih belum berpihak ke petani dan yang lebih diuntungkan adalah pedagang. Kendala-kendala tersebut karena tidak mudah dilalui maka dilakukan usaha perbaikan di dalam penerapan PTKJS antara lain Balai Benih Induk (BBI) harus berperan, pemanfaatan hasil- hasil kajian pada kondisi spesifik lokasi untuk kegiatan pengendalian hayati, peningkatan peran penyuluhan untuk implementasi PTKJS dan mengembangkan kelembagaan pemasaran yang dekat dengan kelompok tani (Helena, 2012). Kelompok tani didorong untuk tidak melakukan panen secara tebasan, petani didorong untuk melakukan sortasi, grading dan pengemasan sehingga Poktan berperan sebagai pemasaran buah. Tujuan dari tulisan ini adalah memecahkan masalah dalam pengimplementasikan PTKJS dan menyarankan upaya implementasi PTKJS dan menyarankan upaya perbaikannya. Manfaat buah jeruk selain sebagai buah segar atau makanan olahan karena cita rasa dan kandungan vitamin C yang tinggi (PKBT-IPB, 1998).

Metode penulisannya adalah review maka penulisan ini disusun berdasarkan data sekunder dari wilayah pengkajian Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Data tersebut terkait dengan komponen-komponen teknologi PTKJS yang diimplementasikan di beberapa daerah sentra jeruk.

Tabel 1. Data Produksi Jeruk (ton) di Beberapa Provinsi mulai tahun 2010 – 2014.

Provinsi	2014	2013	2012	2011	2010
Sumatera Barat	55.180	40.522	41.837	35.461	31.616
Jawa Barat	29.539	29.487	26.579	22.957	22.639
Jawa Timur	568.775	514.855	362.679	31.5133	267.061
Kalimantan Barat	187.016	154.305	171.558	109.335	145.671
Kalimantan Timur	13.110	12.275	9.899	9.621	10.091

Sumber : Statistik Pertanian 2015.

Produksi jeruk di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun sedangkan produksi jeruk nasional di beberapa propinsi dalam lima tahun terakhir sejak 2010 – 2014 tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Produksi jeruk tertinggi dicapai di Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2014 yaitu sebesar 568.775 ton sedangkan dalam tahun 2010 sebesar 267.061 ton (Statistik Pertanian, 2015). Faktor-faktor yang berperan dalam fluktuasi produksi adalah karena perubahan fungsi lahan, perubahan musim atau karena adanya serangan hama dan penyakit yang menyebabkan kegagalan produksi. Peningkatan produksi jeruk tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus secara terpadu sejak penyiapan benih sampai panen dan pascapanen termasuk di dalamnya pemeliharaan kebun (Supriyanto, 2005).

Implementasi Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) di Beberapa Daerah Sentra Jeruk

Implementasi untuk pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat yang dihasilkan Balitbangtan telah dilaksanakan oleh sebagian besar petani pengelola tanaman jeruk yang

telah mendapat informasi teknologi tersebut (Ditjenhortikultura, 2009). Kelompok Tani sebagai satuan terkecil memiliki anggota dengan berbagai kemampuan adopsi yang berbeda, untuk itu harus dilakukan transfer teknologi yang lebih intensif dari petani yang telah melaksanakan teknologi PTKJS kepada yang belum melaksanakan. Disisi lain disadari bahwa masih banyak kelompok tani yang belum menerapkan teknologi PTKJS secara benar dan konsisten. Kegiatan diseminasi ini diharapkan dapat menyediakan teknologi langsung dari sumber inovasi teknologi di Balitbangtan (Kementan, 2010). Kelompok tani seharusnya segera bisa menerapkan PTKJS apabila PTKJS diterapkan otomatis meningkatkan produksi.

Walaupun kebutuhan inovasi teknologi masing-masing kawasan pengembangan agribisnis di setiap provinsi tidak sama, tetapi secara umum akan mencakup sebagian atau semua aspek seperti berikut : (1). Ketersediaan benih berlabel biru pada saat yang dibutuhkan; (2). Pembentukan arsitektura pohon dan pemangkasan pemeliharaan; (3). Pengendalian hama penyakit penting terutama kutu sisik, tungau, lalat buah; CVPD dan penyakit busuk batang dan akar; (4). Pengelolaan pasca panen yang belum optimal; (5). Kelembagaan petani yang belum mandiri ; (6). Akses modal dan informasi pasar yang tidak lancar dan (7) Konsolidasi kebun sulit diterapkan (Ditjenhortikultura, 2008) . Kegiatan utama di kawasan agribisnis tersebut adalah, (1) Pelatihan bagi petani/penangkar benih jeruk dan petugas lapang dinas setempat, (2) Pendampingan penerapan teknologi anjuran yang dalam hal ini adalah Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) dan (3) Penguatan kelembagaan petani/penangkar benih. Agar adopsi teknologi anjuran dapat cepat berlangsung maka dibangun demoplot yang menjadi kebun jeruk terpilih yang dikelola sepenuhnya dengan menerapkan PTKJS secara utuh dan benar. Balitjestro akan menjadi narasumber kegiatan SL-PTKJS dalam muatan teknologinya (Endarto, et al, 2006).

Kegiatan PTKJS tersebut tidak hanya terfokus kepada kegiatan teknisnya saja namun SDM (Sumberdaya Manusia) harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang handal maka kegiatan PTKJS bisa termonitor dengan baik maka pendampingan bisa dilakukan sesuai dengan yang kita harapkan.

Implementasi Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) di Gunung Omeh di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Pengembangan kawasan agribisnis jeruk Siam Gunung Omeh di Provinsi Sumatera Barat akan difokuskan di Kabupaten Solok Selatan. Hasil pendampingan penerapan PTKJS di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa tingkat adopsi kelompok tani meningkat dari 63 sampai 72% pada enam bulan meningkat menjadi 72 sampai 86% setelah satu tahun (Balitjestro, 2014). Pengembangan agribisnis jeruk Provinsi Sumatera Barat telah menentukan varietas jeruk unggulan asli Sumbar yang akan dikembangkan yaitu siam Gunung Omeh yang telah dilepas Menteri Pertanian pada tahun 2010 berasal dari Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2012 telah menetapkan 3 Kabupaten di Sumatera Barat sebagai sentra produksi jeruk yaitu Kabupaten Solok Selatan, Agam, dan Limapuluh Kota.

Pada tahun 2012 mencapai 508 Ha pengembangan jeruk siam Gunung Omeh mencapai 508 Ha, dengan perincian 200 Ha di Kab. Limapuluh Kota, 200 Ha di Kab. Agam dan 108 Ha di Kab. Solok Selatan. Sedangkan pengembangan pada tahun 2013 meliputi 98 Ha di Kab. Limapuluh Kota, 98 Ha di Kab. Agam dan 198 Ha di Kab. Solok Selatan sehingga jumlah keseluruhan ada 394 ha. Luas pengembangan jeruk siam Gunung Omeh di Kab. Solok Selatan pada tahun 2013 dialokasikan paling banyak dibanding Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam.

Berdasarkan peluang pengembangan yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat dan pengawalan yang telah dilakukan Balitbangtan yang dilaksanakan oleh Balitjestro terfokus pada satu wilayah pengembangan, yaitu di Kabupaten Solok Selatan.

Pengembangan komoditas jeruk di Kabupaten Solok Selatan terutama berada di Kecamatan Pikonina yang tergabung dalam kelompok tani Tani Ngadi Kamulyan dan Taruko Baru, sedangkan kelompok tani jeruk lainnya meliputi kelp. Tani Tunas Muda, Jaya Makmur, Sindang Sari Maju, Sepakat, Kato Saiyo, Tunas Baru, Karya Muda, dan Ampalo Sejahtera.

Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Solok Selatan memiliki agroklimat yang sangat sesuai dengan kebutuhan komoditas jeruk, sehingga memiliki potensi pengembangan

dan hasil yang sangat baik untuk pengembangan komoditas jeruk, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan tanaman jeruk milik kelompok tani yang telah tumbuh subur dan vigor saat berumur 1 tahun. Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok tani dan individu masing-masing petani memotivasi dan semangat yang tinggi untuk belajar menerapkan teknologi Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS).

Demoplot, dipergunakan sebagai wahana pembelajaran bagi unit terkecil dari pembinaan yaitu kelompok tani yang telah terbentuk di wilayah PKAH. Tanaman jeruk yang telah ada di lokasi demoplot sebanyak 300 tanaman atau 0,5 hektar dikelola dengan teknologi PTKJS.

Pendampingan Teknologi, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di demoplot, meliputi : (1) Benih sudah menggunakan benih jeruk bebas penyakit yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, (2) Mengendalikan serangga vektor dilaksanakan menggunakan bark painting, (3) Eradikasi tanaman yang diduga terserang CVPD, (4) Pemeliharaan secara optimal dengan melaksanakan pemupukan dan pengendalian serangan OPT, (5) Penerapan teknologi dikerjakan serentak bersama anggota kelompok.

Di Jawa Timur pengembangan kawasan agribisnis jeruk hanya di Kabupaten Tuban, yaitu keprok Madura dan Tejakula yang sudah mulai berbuah. Terciptanya pengembangan kawasan agribisnis jeruk di Kecamatan Singgahan mendorong Pemerintah Daerah Tuban untuk membuat program lanjutan yang lebih besar dan terstruktur dengan melibatkan lembaga/instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten dan Institusi Kementerian Pertanian yang terkait (Utomo et al, 2013).

Di Kalimantan Timur sentra utama jeruk keprok Borneo tersebar di lima kabupaten yaitu Kutai Timur, Nunukan, Bulungan, Berau dan Paser. Kegiatan difokuskan di Kabupaten Nunukan. Penguatan kelembagaan dilakukan bersamaan dengan penyuluhan dan pendampingan lapang oleh petugas dari Balitjestro/BPTP, provinsi/dinas provinsi dan kabupaten. Kegiatan penguatan kelembagaan kelompok lebih sistemik dan terkoordinasi baik. Kelompok tani di Kabupaten Nunukan telah dapat melaksanakan teknologi PTKJS dengan benar dan menghasilkan varietas keprok Borneo Prima dan Tejakula berwarna oranye yang siap dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia (Balitjestro, 2014a).

Langkah-langkah penting yang dilakukan agar proses adopsi teknologi anjuran bisa berlangsung optimal dalam Penerapan PTKJS pada Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, adalah : (1) Demoplot (2) Pelatihan, pelatihan diselenggarakan oleh BPTP bekerjasama dengan dinas setempat dan narasumbernya oleh Balitjestro. Pelatihan ini tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, (3) Asistensi pendampingan penerapan teknologi anjuran, (4) Penguatan kelembagaan, peranan kelembagaan ini sangat penting untuk mendukung penerapan PTKJS.

Inti dari Implementasi PTKJS di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur adalah :

- Petani sebagian besar sudah menggunakan benih berlabel.
- Adopsi komponen teknologi PTKJS untuk pengendalian vektor, sanitasi kebun dan pemeliharaan optimal sudah diterapkan.
- Kelembagaan masih belum terkoordinasi secara baik.

PTKJS di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur nampaknya menghadapi permasalahan yang sama yaitu kelembagaan yang belum terbentuk secara utuh. Peran kelembagaan sangat penting dalam mendukung kegiatan PTKJS karena kelembagaan ini harus didukung oleh adanya Gabungan Kelompok Tani, kelompok-kelompok tani, Pemerintah Daerah dan pengambil kebijakan. Peran kelembagaan bersifat berkelanjutan maka peran SDM sangat menentukan dalam implementasi PTKJS.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PTKJS adalah, (1) Benih berlabel tidak selamanya tersedia. Benih berlabel adalah komponen teknologi yang sangat penting dalam penentuan produksi, apabila menggunakan benih tidak berlabel maka tanaman cepat atau

mudah terserang penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi. (2) Pengendalian H/P secara hayati masih terbatas karena petani masih sering menggunakan pestisida kimia. Tingkat kesadaran petani dalam penggunaan bahan hayati masih rendah, mereka menganggap lebih praktis dan cepat dengan menggunakan bahan kimia. Padahal bahan-bahan kimia sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita. (3) Sikap petani yang masih individual tidak mau berkelompok. (4) Sistem pemasaran masih belum berpihak ke petani dan yang diuntungkan adalah pedagang.

Upaya perbaikan yang harus dilakukan adalah : (1) Peran Balai Benih Induk (BBI) harus lebih ditingkatkan. (2) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian/kajian pada kondisi spesifik lokasi untuk pengendalian hayati. (3) Peningkatan peran penyuluhan untuk sosialisasi implementasi PTKJS. (4) Mengembangkan kelembagaan pemasaran yang dekat dengan kelompok tani. Kelompok tani didorong untuk tidak melakukan panen secara tebasan. Petani didorong untuk sortasi, grading dan pengemasan sehingga poktan berperan sebagai pemasar buah.

Kondisi Kawasan Agribisnis Jeruk

- Daya saing lemah, produksi, mutu dan kontinuitas tidak menentu;
- Keberlanjutan tidak terjamin terutama disebabkan oleh reinfeksi penyakit CVPD.

Dikaitkan dengan kehadiran penyakit CVPD yang diketahui menyerang pertama kali pada tahun 1960 an (Tirtawijaya, 1964), selanjutnya outbreak dan menimbulkan kerusakan hampir di seluruh pertanaman jeruk di wilayah Indonesia mulai tahun 1985, maka fluktuasi agribisnis jeruk di Indonesia sebelum tahun 1990 ini dipastikan terkait erat dengan kehadiran penyakit yang mematikan ini. Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan tetapi tidak memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa teknologi telah disediakan, salah satunya adalah penggunaan bibit jeruk bebas penyakit yang mulai diterapkan, namun rendahnya pelaku agribisnis jeruk menerapkan paket teknologi pendukungnya menyebabkan hasilnya kurang memuaskan.

Penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) dengan nama internasional Huanglongbing (HLB) ini disebabkan oleh bakteri gram negatif alpha-proteobacteria *Candidatus Liberibacter asiaticus* (CLas) bakteri yang tidak bisa dibiakkan pada kultur buatan (Jagoueix et al.1994), yang dapat ditularkan oleh serangga vektor *Diaphora citri* dan melalui bibit yang menggunakan mata tempel dan atau semaian batang bawah yang telah terinfeksi patogen CVPD. Epidemologi penyakit CVPD melewati tiga fase yaitu biotrophic, symptomatic dan epidemic. Nurhadi (2012) lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada fase biotropik, yaitu saat pertamakali tanaman terinfeksi CVPD, tanaman seringkali tidak menimbulkan gejala (symptomless)

Potret Agribisnis Jeruk Kini

- Belum menunjukkan gambaran agribisnis-sentra produksi;
- Belum merupakan suatu kawasan tetapi merupakan kantong-kantong produksi yang kecil dan tidak mengelompok;
- Masih sering mendapatkan serangan penyakit CVPD;
- Berdaya saing rendah;
- Kelembagaan petani masih lemah
- Tidak pernah serius, parsial.

Sedangkan status kondisi buah jeruk saat ini yaitu buah jeruk menjadi salah satu buah yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Diantaranya yang paling populer adalah jeruk keprok yang dikonsumsi sebagai buah segar. Menurut Hutabarat dan Adi Setyanto, 2007 jeruk keprok rasanya manis, segar, harga relatif murah dan mudah didapat dimana saja, kapan saja di pelosok negeri. Apalagi dalam beberapa tahun sekarang ini buah jeruk impor membanjiri pasar Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena pola panen tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan jeruk lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik sepanjang tahun sehingga membuka peluang masuknya jeruk-jeruk impor.

Teknologi pada komoditas jeruk tidak hanya pada panen tetapi dalam hal penanganan pasca panen perlu perhatian yang khusus. Mahaputra (2012) menunjukkan bahwa teknologi penanganan pascapanen yaitu sortasi, grading dan pengemasan dapat meningkatkan keuntungan petani tomat, kubis dan buncis di Provinsi Bali. Bahkan menurut Sulistyawati (2012) kelembagaan petani merupakan titik strategis dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Sedangkan menurut Sulusi, 2007, implementasi inovasi teknologi pengolahan jeruk siam dalam rangka membangun sebuah model agroindustri pengolahan jeruk siam telah dilakukan di Citrus Center, Tebas, Sambas, Kalbar. Inovasi utama pengolahan jeruk adalah pada formula untuk meurunkan rasa pahit pada jus jeruk yang didukung oleh cara produksi skala pilot yakni proses pencucian, pemerasan, penyaringan, pencampuran, pasteurisasi dan pengemasan dalam satu rangkaian.

Menurut Syahyuti 2003 bahwa pengembangan kelembagaan perbenihan merupakan bagian yang krusial dalam pengembangan kawasan komoditas tersebut. Hal tersebut menjadi sangat penting karena permasalahan mendasar yang dihadapi pada sistem perbenihan nasional. Sedangkan menurut Kasimin (2013), peningkatan produksi tanaman hortikultura dipengaruhi oleh sarana produksi dan teknologi sedangkan pendapatan dipengaruhi oleh harga jual dan pemasaran.

Faktor Penyebab

- Belum didukung sepenuhnya oleh inovasi jeruk akibatnya : keberlanjutan terganggu oleh penyakit CVPD dan daya saingnya rendah.
- Kelembagaan petani rapuh akibatnya : adopsi teknologi anjuran lambat posisi tawar petani lemah .
- Sistem diseminasi dan alih teknologi belum terbentuk akibatnya : petugas lapang tidak berfungsi secara optimal.
- Kebijakan pemerintah belum mendukung sepenuhnya.

Bibit Jeruk Yang Beredar Tidak Semuanya Berlabel Biru.

Di Sambas yang berlabel biru hanya berkisar 20-30%; di Purworejo : 25-35%; di kawasan Bangkinang : 5 %; dan di Banyuwangi, Jember, Lumajang : 20-30%; Penyebabnya karena mata tempel tidak tersedia dalam jumlah cukup.

KESIMPULAN

Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur secara umum telah mengimplementasikan Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) sudah sesuai dengan komponen-komponen teknologi yang dianjurkan, namun yang harus difokuskan lagi adalah masalah kelembagaan. Kelembagaan petani merupakan satuan terkecil penyuluhan, karena kelompok tani yang menyatukan pelaku PTKJS dalam satu kawasan. Konsep pengembangan kawasan telah diinisiasi para pemangku kebijakan dan saat ini konsep kawasan dipahami sebagai upaya membangun jaringan kerjasama antar pelaku dalam gabungan wilayah yang memiliki kondisi agroklimat yang sama (Saptana, 2005). Menurut Kasimin (2013), peningkatan produksi tanaman hortikultura dipengaruhi oleh sarana produksi dan teknologi sedangkan pendapatan dipengaruhi oleh harga jual dan pemasaran.

SARAN

- Membangun kembali dan memperbaiki sistem pengadaan benih jeruk bebas penyakit untuk varietas-varietas sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Salah satu yang penting adalah keterkaitan antara institusi penghasil benih dasar dan benih sebar di masing-masing daerah.

- Dalam rangka pengembangan kawasan agribisnis jeruk secara nasional sebaiknya Balai Benih Induk (BBI) di setiap provinsi difungsikan sebagai pengelola benih dasar dan juga BPMT (Blok Pondasi Mata Tempel).
- Jaminan kebenaran varietas-varietas jaminan mutu benih tetap dilaksanakan oleh BPSB setempat. Balitjestro punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas petugas di setiap provinsi.
- Untuk mempercepat produksi dan penyebaran benih jeruk bebas penyakit maka pihak swasta perlu dilibatkan dalam rangka penyediaan benih dasar dan BPMT, seperti halnya substansi KEPMENTAN 131 mengenai bawang merah maka sewajarnya swasta mendapatkan legalitas untuk mengelola dan memproduksi benih bebas penyakit. Untuk setiap perusahaan swasta yang berminat untuk mendapatkan legalitas tersebut harus memiliki kemampuan dan sudah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) (ISO,9001, 2008).dan pengelolaan laboratoriumnya di ISO 17025.
- Teknologi-teknologi mendukung PTKJS harus disosialisasikan secara berkesinambungan di sentra-sentra produksi untuk pengembangan kawasan melalui BPTP. Untuk itu BPTP perlu difasilitasi dengan sumberdaya yang memadai. Dalam jangka panjang BPTP harus diperankan sebagai lembaga yang berperan dalam pengujian kebenaran varietas jeruk dan indeksing (pemeriksaan penyakit) untuk penyediaan benih bebas penyakit di daerah sebagai mitra BPSB.
- Konsolidasi kebun harus dibangun secara terpadu melibatkan instansi/dinas terkait di daerah yang mencakup (UPTD) pertanian dan penyuluhan. Seharusnya kelembagaan y dibangun dan dikembangkan mencakup kelembagaan petani, pemodaln pengelolaan input produksi, alsintan, pengairan dan kelembagaan pemasaran. Maka dengan itu kelembagaan petani harus secara intensif dibina dalam rangka penyediaan hasil buah jeruk yang bermutu baik dengan menerapkan pengelolaan pasca panen (sortasi, grading dan pengemasan) agar dapat meningkatkan posisi tawar.

Kebijakan

- Perlunya penyediaan rumah kasa dan pohon induk bagi penangkar.
- Perlunya peningkatan infrastruktur dan koordinasi kelembagaan yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, saya sampaikan terimakasih kepada Bapak Ir. Agus Muharam, MS, selaku senior dan Koordinator Kelompok Pengkaji Pendampingan yang telah memberikan bimbingan dan pembinaan dalam penulisan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M.A. 1993. Agroindustri Buah-buahan Tropika Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA). Jakarta.
- Balitjestro. 2014. Laporan Tahunan Balai Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika. Batu
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2008. Membangun Hortikultura Berdasarkan Enam Pilar Pengembangan. Departemen Pertanian.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2009. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Buah-Buahan Nusantara Serta Posisinya di Pasar Domestik dan Internasional. Makalah disampaikan pada Seminar Buah Nusantara di Bogor tanggal 28 – 29 Oktober 2009.
- Endarto, O., A. Supriyanto, S. dan A. Triwiratno. 2006. Evaluasi Penerapan Pengelolaan Terpadu Kebn Jeruk Sehat (PTKJS) pada daerah endemis CVPD. Prosiding Seminar Nasional Jeruk Tropika Indonesia. Batu.
- Hardiyanto, et al. 2011. Dukungan Teknologi Inovatif Jeruk Bebas Penyakit dan Buah Subtropika di Kawasan Hortikultura. Balitjestro. Batu.

- Helena da Silva. 2012. Profil kelompok tani dan kenerja usahatani jeuk di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU). Prosiding Workshop Rencana Aksi Rehabilitasi Agribisnis Jeruk Keprok SoE yang Berkelanjutan Untuk Substitusi Impor di Nusa Tenggara Timur. Puslitbanghorti.
- Hutabarat, B dan Adi, S. 2007. Komoditas Jeruk Indonesia di Persimpangan Jalan Pasar Domestik dan Internasional. Prosiding Semnas Jeruk. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Jakarta.
- Jagoueix, Bove, and Garnier, 1994, *International Journal of Systematic Bacteriology*.
- Kasimin. 2013. Keterkaitan produk dan pelaku dalam pengembangan agribisnis hortikultura unggulan di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*.
- Kementerian Pertanian. 2010. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Jakarta. 184 hal.
- Mahaputra, I.K. 2012. Introduksi Teknologi Pascapanen Komoditas Hortikultura Sayuran Terhadap Tingkat Keuntungan Petani di Bali. Pros. Semnas Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Bogor.
- Muharam, A and A.M Whittle. 1992. Indexing of citrus for major systemic pathogens in Indonesian Citrus Variety Improvement Programme, in Proc. of Asian Citrus Rehabilitation Conference, Malang, Indonesia.
- Nurhadi. 2012. Epidemiologi penyakit Huanglongbing dan Implikasinya terhadap Manajemen Penyakit. Simposium dan Seminar Bersama PERAGI, PERIPI, PERHORTI, HIGI. 'Mendukung kedaulatan pangan dan energy yang berkelanjutan'. IPB Internatinal Convention Center.
- PKBT-IPB. 1998. Kajian Pengembangan Agribisnis Buah Tropis Unggulan dalam Mendukung Pengembangan Pembibitan . Departemen Pertanian dengan Pusat Kajian Buah Tropika. IPB.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan HOrtikultura. 2010. Draft Pedum Program Dukungan Pengembangan Kawasan Hortikultura. Jakarta.
- Ruswandi, A., A. Muharam, Hilmi Ridwan, Sabari dan Rofik S.B. 2008. Tingkat Adopsi Teknologi Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) dalam M. Winarno, Sabari, S. Subandiyah, L. Setyobudi dan A. Supriyanto (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional Jeruk 2007.
- Saptana. 2005. Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS), Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Statistik Pertanian. 2015. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Sulistyawati, H. 2012. Kajian Kelembagaan dan Inovasi Teknologi Mendukung Daya Saing Agribisnis Bawang Palu Desa Guntarano. Dalam Prosiding Semnas Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Bogor.
- Sulusi, P. 2007. Implementasi Inovasi Teknologi Pengolahan Jeruk Siam. Pros. Semnas Jeruk 2007. Yogyakarta.
- Supriyanto, A. and A.M. Whittle. 1992. Citrus Rehabilitation in Indonesia. In R.H. Brlansky, R.F. Hee and L.W. Timmer (edts.) Proc. 11th Conf. of IOCV.
- Syahyuti, 2003. Bedah Konsep Kelembagaan Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. PSE-KP. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Tirtawijaya, 1964, Citrus Vein-Phloem Degeneration Penyebab dari Citrus Clorosis di Jawa. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
- Utomo, Joko Susilo et al. 2013. Laporan Tahunan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.